

LAKIP

TAHUN 2016



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (LAKIP) Tahun 2016 ini disusun. Lakip ini menyajikan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama Tahun 2016 yang merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu LAKIP juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LAKIP Tahun 2016 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, tentunya bukan hanya menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih merupakan tujuan utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih.

Beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan birokrasi menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 dapat diselesaikan. LAKIP ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan maksud untuk mengetahui kemajuan (*progress*) dan prestasi kerja (*achievement*) yang dicapai pada tahun 2016. LAKIP Bappeda 2016 ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya saran dan masukan yang konstruktif demi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas-tugas Bappeda di masa mendatang. Di ucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah secara aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi pada penyusunan LAKIP Bappeda Tahun 2016 ini.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini dapat memberikan manfaat serta gambaran bagi peningkatan kinerja Bappeda di masa yang akan datang.

Tarempa, Januari 2017

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

AUGUS RAJA UNGGUL, S.Sos.,MPA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720809 199203 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM PD

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dan evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah membawa perubahan manajemen dalam kegiatan penyelenggaraan negara yang bercorak sentralistis ke arah manajemen yang bercorak desentralistis, demokratis dan otonom.

Perubahan yang ada menjadikan tantangan kedepan yang semakin berat bukan hanya karena perkembangan lingkungan strategis, domestik dan internasional tetapi juga batasan-batasan terhadap kiprah perencanaan. Hal ini tentunya harus dihadapi dan dijawab dengan perencanaan pembangunan yang lebih baik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia telah membawa perubahan manajemen dalam kegiatan penyelenggaraan negara yang bercorak sentralistis ke arah manajemen yang bercorak desentralistis, demokratis dan otonom. Perubahan yang ada menjadikan tantangan kedepan yang semakin berat bukan hanya karena perkembangan lingkungan strategis, domestik dan internasional tetapi juga batasan-batasan terhadap kiprah perencanaan. Hal ini tentunya harus dihadapi dan dijawab dengan perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAKIP

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara,

- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 19. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LAKIP Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 ini adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 adalah :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Anambas dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Bappeda.

1.4 SISTEMATIKA LAKIP BAPPEDA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016

Penulisan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN	Menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, sistematika penyusunan LAKIP, serta gambaran umum Kabupaten Kepulauan Anambas.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	Menguraikan gambaran umum Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas, tujuan dan sasaran, serta penetapan kinerja Bappeda tahun 2016 yang menjadi acuan pengukuran kinerja.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	Menguraikan tentang pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja. Dalam bab ini juga menguraikan pencapaian sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas.
BAB IV PENUTUP	Mengemukakan tinjauan secara umum dengan keberhasilan/ kegagalan, permasalahan/ kendala yang berkaitan Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 GAMBARAN UMUM PD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang perencanaan, pembangunan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah sesuai dengan bidang dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud Bappeda menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pemerintah daerah kabupaten dibidang perencanaan pembangunan;
2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang; Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, terdiri dari;

1. Unsur Pimpinan, yaitu :
 - ✓ Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Unsur Staf, yaitu :
 - ✓ Sekretariat Badan, dipimpin oleh Sekretaris dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Bagian Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan

organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, yang terdiri dari;

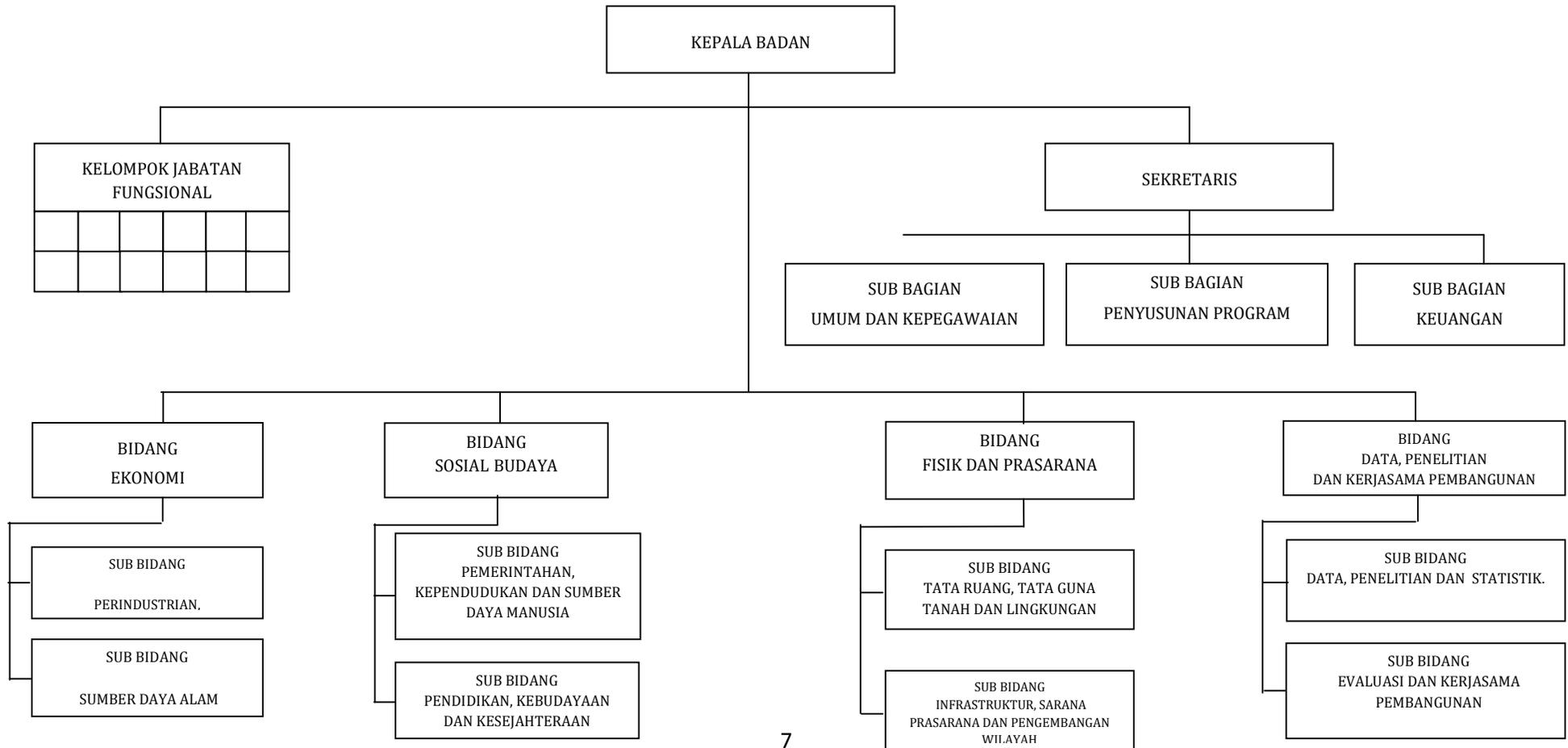
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelayanan, koordinasi, pembinaan/pengendalian dalam urusan umum, perpustakaan, surat-menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan rumah tangga dan kepegawaian.
- Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dibidang urusan penyusunan program Bappeda.
- Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan anggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan.

3. Unsur Pelaksana, yaitu :

- ✓ Bidang Ekonomi, mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan dibidang ekonomi, yang terdiri dari;
 - Sub Bidang Perindustrian, perdagangan koperasi, dan Pembangunan Dunia Usaha.
 - Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam.
- ✓ Bidang Sosial Budaya, mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan dibidang sosial budaya, yang terdiri dari;
 - Sub Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Sumber Daya Manusia.
 - Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat.
- ✓ Bidang Fisik dan Prasarana, mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan dibidang fisik dan prasarana, yang terdiri dari;
 - Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup.
 - Sub Bidang Infrastruktur, Sarana dan Prasarana, Pengembangan Wilayah.
- ✓ Bidang Data, Penelitian, dan Kerjasama Pembangunan, mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan dibidang data, penelitian, dan kerjasama pembangunan, yang terdiri dari;
 - Sub Bidang Data, Penelitian dan Statistik.
 - Sub Bidang Evaluasi Kerjasama Pembangunan.

Tabel II. 1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



2.2 Sumber Daya PD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balitbangpeda harus didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai. Adapun untuk jumlah pegawai pada Balitbangpeda dapat dijelaskan dengan tabel berikut :

Tabel II.2 Data PNS dan PTT pada Balitbangpeda, Per-Januari 2017

No	Nama/ NIP	Golongan Ruang	Pendidikan	Jabatan	Eselon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Augus Raja Unggul, Sos., MPA/ 19720809 199203 1 006	Pembina Utama Muda (IV/c)	S2 Magister Administrasi Publik	Kepala Balitbangpeda	II.b
2.	Adies Saputra, S.IP.,M.Si/ 19831214 201001 1 011	Penata Tingkat I (III/d)	S2 Kebijakan & Administrasi Publik	Sekretaris Balitbangpeda	III.a
3.	Tarmizi, S.Pd,SD/ 19660226 198609 1 001	Pembina (IV/a)	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Kabid Penelitian dan Pengembangan	III.b
4.	Sucipnoriadi, S.H/ 19811125 200604 1 018	Penata Tingkat I (III/d)	S1 Hukum	Kabid Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan	III.b
5.	Kustiorini, S.E/ 19800520 200803 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	S1 Ekonomi	Kabid Ekonomi dan Sosial Budaya	III.b
6.	Andyguna Kurniawan Hasibuan, S.T/ 19820306 201001 1 019	Penata (III/c)	S1 Teknik Elektro	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	III.b
7.	Jumardi, S.T., M.M/ 19800420 201212 1 001	Penata (III/c)	S2 Magister Manajemen	Kasubbag Program	IV.a
8.	Emelia Kontesa, S.IP/ 19820306 201001 2 021	Penata (III/c)	S1 Hubungan Internasional	Kasubbid Kerjasama Pembangunan	IV.a
9.	H. Acla Fanthia, S.Sos/19831231 201001 1 037	Penata (III/c)	S1 Pemerintahan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV.a
10.	Doddy D Iskandar/ 19840603 201001 1 019	Penata (III/c)	S1 Ekonomi	Kasubbid Ekonomi	IV.a
11.	Dewi Andya Sari, S.T/ 19840218 201001 2 014	Penata (III/c)	S1 Planologi	Kasubbid Penelitian dan Pendataan	IV.a

No	Nama/ NIP	Golongan Ruang	Pendidikan	Jabatan	Eselon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Zaili, S.Pi/ 19760210 201101 1 001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S1 Perikanan	Kasubbid Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah	IV.a
13.	Tieneke Coester, S.E/ 19791102 201001 2 012	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S1 Manajemen	Fungsional Umum	-
14.	Welly Indra, S.H/ 19820308 201001 1 007	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S1 Hukum	Fungsional Umum	-
15.	Lenny Satriany, S.E/ 19820821 201001 2 013	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S1 Manajemen	Fungsional Umum	-
16.	Herlina, S.E/ 19800323 201101 2 001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S1 Manajemen	Fungsional Umum	-
17.	Yandri Yanto, S.E/ 19820807 201101 1 001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S1 Manajemen	Fungsional Umum	-
18.	Nurhayati, S.E/ 19820807 201212 2 001	Penata Muda (III/a)	S1 Ekonomi Manajemen	Fungsional Umum	-
19.	Noprida Husin, S.Pt/ 19841111 201212 2 001	Penata Muda (III/a)	S1 Peternakan	Fungsional Umum	-
20.	Zakaria, S.AP/ 19760913 199603 1 003	Penata Muda (III/a)	S1 Administrasi Negara	Fungsional Umum	-
21.	Nurisman Effendi, S.Sos/ 19870302 201404 1 001	Penata Muda (III/a)	S1 Pemerintahan	Fungsional Umum	-
22.	Trianova Maulana Putra, S.T/ 19870302 201404 1 001	Penata Muda (III/a)	S1 Teknik Informatika	Fungsional Umum	-
23.	Ika Rio Saputra, S.E/ 19890212 201404 1 001	Penata Muda (III/a)	S1 Ekonomi Manajemen	Fungsional Umum	-
24.	Virginiawan, S. AP/ 19910826 201404 1 001	Penata Muda (III/a)	S1 Administrasi Negara	Fungsional Umum	-
25.	R. Juliana, S.IP/ 19820708 201001 2 014	Penata Muda (III/a)	S1 Pemerintahan	Fungsional Umum	-
26.	Maryati, A.Md/ 19820320 201001 2 011	Pengatur Tingkat I (II/d)	D3 Manajemen Informatika	Fungsional Umum	-
27.	Gunawan. A.Ma.Pd/ 19821026 200604 1 009	Pengatur (II/c)	D2 PGSD	Fungsional Umum	-
28.	Rio Asnoto/ 19760503 200604 1 018	Pengatur (II/c)	SMA IPS	Fungsional Umum	-

No	Nama/ NIP	Golongan Ruang	Pendidikan	Jabatan	Eselon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	Muhammad Fakhron/ 19870920 201001 1 003	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	SMK Elektro	Fungsional Umum	-
30.	Leni Afrina/ 19850408 201406 2 006	Pengatur Muda (II/c)	SMA IPA	Fungsional Umum	-
31.	R. Fuji Lestari, S.Sos/ 05.0007.08	-	S1 Administrasi Negara	Fungsional Umum	-
32.	Wahyu Jali Sugito, S.Sos/ 05.0574.10	-	S1 Ilmu Hubungan Masyrarakat	Fungsional Umum	-
33.	Andri, S.Sos/ 05.1698.13	-	S1 Administrasi Negara	Fungsional Umum	-
34.	Murni Rahayu, S.T/ 05.1699.13	-	S1 Planalogi	Fungsional Umum	-
35.	Susi Susanti, S.Si/ 05.1702.13	-	S1 Fisika	Fungsional Umum	-
36.	Bima Tri Widyatmoko, S.Pi/ 05.2005.14	-	S1 Perikanan	Fungsional Umum	-
37.	David Hardiansyah/ 03.0006.08	-	SMA	Fungsional Umum	-
38.	Supriyadi/ 03.0022.09	-	MA/IPA	Fungsional Umum	-
39.	Endang/ 03.0576.10	-	SMA	Fungsional Umum	-
40.	Samsu/ 03.1352.12	-	SMK	Fungsional Umum	-
41.	Safawi/ 03.1326.12	-	SMA	Fungsional Umum	-
42.	Rumiyani/ 03.1295.12	-	SMA	Fungsional Umum	-
43.	Leli Sopia/ 03.1686.13	-	SMA	Fungsional Umum	-
44.	Mardianto/ 03.1983.14	-	SMK	Fungsional Umum	-
45.	Casminih/ 03.2044.14	-	SMA	Fungsional Umum	-

No	Nama/ NIP	Golongan Ruang	Pendidikan	Jabatan	Eselon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46.	Zamiri/ 02.1368.12	-	SMP	Fungsional Umum	-
47.	Al Qausar	-	SMA	Fungsional Umum	-
48.	Maharani	-	SMP	Fungsional Umum	-
49.	Meriani	-	SMA	Fungsional Umum	-
50.	Rohmanullah Lubis	-	MA	Fungsional Umum	-

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Balitbangpeda Tahun 2017.

Secara Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Tujuan usaha berupa target yang bersifat kuantitatif dan merupakan pencapaian ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran usaha harus spesifik, terukur, jelas kriterianya, memiliki indikator yang rinci sehingga bisa tercapai secara efektif dan efisien. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah daerah pada Bappeda untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel II.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator	Capaian		Program	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Awal	Akhir			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
V I	Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya implementasi <i>e-government</i>	Penguatan master plan dan grand strategy e-gov yang dituangkan dalam peraturan daerah beserta petunjuk pelaksanaan teknisnya meliputi tindakan dan penyediaan sarana	Jumlah penyelenggaraan G to C, G to B, G to G, dan G to E secara daring	5	12	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Komunikasi dan informatika	Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah
		Meningkatkan kualitas produk-produk perencanaan dan kebijakan daerah	Meningkatnya kualitas dan sinergitas produk-produk perencanaan daerah dalam mendorong prioritas daerah	Peningkatan sinergi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah	Tingkat ketercapaian RPJM (> 80 %)	100 %	100 %	Program kerjasama pembangunan	Penunjang Lainnya	Semua PD
				Pelaksanaan monitoring dan evaluasi			Program perencanaan pembangunan			Badan Penelitian Pengembangan

			capaian target pembangunan melalui LKPJ Tahunan				n daerah		dan Perencanaan Daerah
							Program perencanaan pembangunan ekonomi		Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah
		Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan partisipasi masyarakat dengan memetakan potensial <i>stakeholder</i> dan mengintegrasikan dokumen musrenbang Desa kecamatan, dan kabupaten	Persentase keterwakilan kelompok-kelompok masyarakat dalam Musrenbang	100 %	100 %	Program perencanaan pembangunan daerah	Penunjang Lainnya	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah

2.3 PENETAPAN KINERJA

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen untuk melaporkan capaian kinerja dan menilai keberhasilan Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016. Dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2016 tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam renstra yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2016, program-program dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran, yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.4 Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitas perencanaan pembangunan	1 Dokumen
2.	Meningkatnya fasilitas pendukung data perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya fasilitas pendukung data perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen
3.	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan dapat diandalkan guna menyajikan berbagai informasi menyangkut profil daerah	Terhimpunnya seluruh data dan informasi yang akurat dan dapat diandalkan guna menyajikan berbagai informasi menyangkut profil daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016	1 Dokumen
4.	Meningkatkan kelemahan dan kekurangan masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Memacu persaingan positif antara unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat	1 Dokumen
5.	Meningkatnya fasilitas data pendukung perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya unsur kenampakan rupa bumi Kabupaten Kepulauan Anambas	1 Paket Peta Rupa Bumi
6.	Meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	1 Dokumen
7.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Terakomodirnya usulan program/ kegiatan SKPD tahun 2016	1 Dokumen
8.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya pedoman rencana pembangunan tahun 2016	1 Dokumen
9.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah	1 Dokumen
10.	Peningkatan perencanaan pembangunan daerah	Diperolehnya keterangan pertanggungjawaban kepala daerah sebagai evaluasi pembangunan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Peningkatan perencanaan pembangunan daerah	Diperolehnya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	1 Dokumen
12.	Peningkatan perencanaan pembangunan daerah	Diperolehnya dokumen KUA dan PPAS perubahan APBD dan APBD tahun anggaran 2016	1 Dokumen
13.	Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	1 Dokumen
14.	Meningkatnya kualitas perencana pengendalian dan evaluasi pembangunan di daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan	Mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	1 Dokumen
15.	Meningkatkan fasilitas data pendukung perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya unsur kenampakan rupa bumi Kabupaten Kepulauan Anambas	1 Paket Peta Rupa Bumi
16.	Meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	1 Dokumen
17.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah	Terakomodirnya usulan program/ kegiatan/ desa/ kelurahan/ kecamatan serta SKPD	1 Dokumen
18.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya pedoman rencana pembangunan tahun 2016	1 Dokumen
19.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan jangka menengah	1 Dokumen
20.	Peningkatan perencanaan pembangunan daerah	Diperolehnya keterangan pertanggungjawaban kepala daerah sebagai evaluasi pembangunan	100%
21.	Peningkatan perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	1 Dokumen
22.	Peningkatan perencanaan pembangunan daerah	Diperolehnya dokumen KUA dan PPAS perubahan APBD dan APBD tahun anggaran 2016	1 Dokumen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
23.	Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastuktur	Tercapainya sinkronisasi perencanaan bidang infrastruktur	1 Dokumen
24.	Terlaksananya penyusunan Renstra	Terfasilitasinya penyusunan renstra SKPD	1 Dokumen
25.	Tim koordinasi stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	terfasilitasinya dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	1 Dokumen
26.	Meningkatnya mekanisme dan sistem perencanaan pembangunan daerah	Tercapainya mekanisme dan sistem perencanaan pembangunan daerah	2 Dokumen
27.	Terfasilitasinya koordinasi perencanaan	Terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan rapat-rapat	1 Paket Aplikasi
28.	Pembangunan bidang ekonomi	Dalam rangka perencanaan pembangunan ekonomi	
29.	Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Terlaksananya koordinasi fasilitas rapat-rapat dalam rangka perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 Dokumen

	Jumlah Anggaran	Rp.	3.689.618.500
1.	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp.	351.600.000
2.	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Rp.	513.884.500
3.	Program Kerjasama Pembangunan	Rp.	150.000.000
4.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	2.374.134.000
5.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Rp.	150.000.000
6.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Rp.	150.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

Kerangka kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas secara realistis dihubungkan dengan sumber daya yang tersedia.

Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan dengan mengumpulkan data-data kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditunjuk sebagai penanggungjawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran yang ingin dicapai.

Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 ditargetkan untuk dicapai. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form pengukuran kinerja yang mencerminkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan dapat diuraikan secara rinci pada sub bab berikutnya.

3.2 PENGUKURAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin kurang baik, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja	=	Realisasi Rencana (Target)	X 100%
---------------------------	---	----------------------------	--------

a. Pengukuran Kinerja

Dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan.

- b. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Selain itu, memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kerjanya atau yang disimbolkan dengan **CK** yang dikelompokkan dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel Skala Pengukuran Capaian Kinerja (CK) serta hasil dan penjelasan		
Skala Capaian Kinerja (%)	Hasil Capaian Indikator Kinerja	Penjelasan Skala Capaian Kinerja
CK > 75	Sangat Berhasil	Capaian kinerja diatas 75%
50 < CK < 75	Berhasil	Capaian kinerja diatas 50% dengan kurang dari 75%
25 < CK < 50	Cukup Berhasil	Capaian kinerja diatas 25% dengan kurang dari 50%
0 < CK < 25	Tidak Berhasil	Capaian kinerja kurang dari 25%

Hasil Pengukuran Kinerja :

1. Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.
2. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi "Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing,

Maju dan Berakhlakul karimah” yang disingkat menjadi “ANAMBAS BERMADAH 2021”.

3. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan keluaran dan hasil.
4. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.
5. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:
 - a. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
 - b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapkin), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.
6. Upaya pengukuran kinerja di akui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumberdana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2016 secara keseluruhan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.1 Pengukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.	Meningkatnya fasilitas pendukung data perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya fasilitas pendukung data perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan dapat diandalkan guna menyajikan berbagai informasi menyangkut profil daerah	Terhimpunnya seluruh data dan informasi yang akurat dan dapat diandalkan guna menyajikan berbagai informasi menyangkut profil daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.	Meningkatkan kelemahan dan kekurangan masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Memacu persaingan positif antara unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.	Meningkatnya fasilitas data pendukung perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya unsur kenampakan rupa bumi Kabupaten Kepulauan Anambas	1 Paket Peta Rupa Bumi	-	0%
6.	Meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Terakomodirnya usulan program/ kegiatan SKPD tahun 2016	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya pedoman rencana pembangunan tahun 2016	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
9.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
10.	Peningkatan perencanaan pembangunan daerah	Diperolehnya keterangan pertanggungjawaban kepala daerah sebagai evaluasi pembangunan	100%	100%	100%
11.	Peningkatan perencanaan pembangunan daerah	Diperolehnya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
12.	Peningkatan perencanaan pembangunan daerah	Diperolehnya dokumen KUA dan PPAS perubahan APBD dan APBD tahun anggaran 2016	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
13.	Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastuktur	Tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang infrastuktur	1 Dokumen	1 Dokuemn	100%
14.	Meningkatnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan di daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan	Mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
15.	Meningkatkan fasilitas data pendukung perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya unsur kenampakan rupa bumi Kabupaten Kepulauan Anambas	1 Paket Peta Rupa Bumi	-	-
16.	Meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah	Terakomodirnya usulan program/ kegiatan/ desa/ kelurahan/ kecamatan serta SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
18.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya pedoman rencana pembangunan tahun 2016	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
19.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan jangka menengah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
20.	Peningkatan perencanaan pembangunan daerah	Diperolehnya keterangan pertanggungjawaban kepala daerah sebagai evaluasi pembangunan	100%	100%	100%
21.	Peningkatan perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
22.	Peningkatan perencanaan pembangunan daerah	Diperolehnya dokumen KUA dan PPAS perubahan APBD dan APBD tahun anggaran 2016	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
23.	Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Tercapainya sinkronisasi perencanaan bidang infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
24.	Terlaksananya penyusunan Renstra	Terfasilitasinya penyusunan renstra SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
25.	Tim koordinasi stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	terfasilitasinya dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	1 Dokumen	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26.	Meningkatnya mekanisme dan sistem perencanaan pembangunan daerah	Tercapainya mekanisme dan sistem perencanaan pembangunan daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
27.	Terfasilitasinya koordinasi perencanaan	Terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan rapat-rapat	1 Paket Aplikasi	1 Paket Aplikasi	100%
28.	Pembangunan bidang ekonomi	Dalam rangka perencanaan pembangunan ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
29.	Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Terlaksananya koordinasi fasilitas rapat-rapat dalam rangka perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

BAB IV

PENUTUP

Pada tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah berupaya melaksanakan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016, dengan optimal. Segala yang telah dilakukan tidak terlepas dari komitmen Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan jajarannya untuk untuk senantiasa meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka melaksanakan aktivitas perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 ini, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2016 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi. Sebanyak 27 sasaran pada tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik yang mana hal ini menunjukkan adanya komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mendukung pencapaian visi misi yang telah tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021.

Dalam rangka melaksanakan program/ kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama tahun anggaran 2016, telah dilakukan penghematan/ efisiensi atas anggaran yang dialokasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu, kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga tidak dapat hanya dilihat secara parsial atau dari sudut pandang pelaksanaan program/ kegiatan saja, namun lebih jauh dari itu harus dilihat seberapa besar kontribusi setiap pelaksanaan program/ kegiatan guna mendukung pencapaian kinerja sasaran stategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kedepan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan terus berupaya secara optimal untuk memperbaiki kinerjanya dalam kerangka mengatasi kendala dan hambatan yang ada. Upaya Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan kinerja akan dilakukan lebih akurat dan cermat, serta berdasarkan indikator kinerja yang disepakati secara bersama-sama dengan para *stakeholders*, sehingga pelaksanaan pembangunan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih obyektif. Selain itu, proses perencanaan akan lebih dioptimalkan sehingga rencana kegiatan yang akan dibuat dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana pada semua aspek;
3. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme-nya melalui pendidikan kedinasan maupun di luar kedinasan;
4. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisis pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
5. Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
6. Meningkatkan evaluasi untuk meningkatkan kinerja unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.